



PASANG IKLAN HUBUNGI  
**0811 5405 033**

*Lebih Dekat dengan Satu Klik*



# RESMI! MAKMUR MARBUN JADI PJ BUPATI PPU

**BACA HALAMAN 2-3**



**PKA BPSDM DKI JAKARTA  
PELAJARI INOVASI PELAYANAN  
ADMINISTRASI KE KALTIM**



**PEMILIK LAHAN  
KEMBALI TUTUP  
JALAN HAULING  
DI DESA BATUAH  
BACA HALAMAN 24**

# Resmi! Mendagri Tetapkan Makmur Marbun Jadi Pj Bupati PPU

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah secara resmi mengumumkan pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3720 Tahun 2023, yang diterima Redaksi Mediakaltim.com, pada Senin (18/9).

Seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya, Keputusan yang ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian, pada 7 September 2023 tersebut, Drs. Makmur Marbun, M. Si., yang saat ini menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk sebagai Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU).

Pengangkatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.

Pj Bupati Penajam Paser Utara akan memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan bupati definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

**Bupati PPU Hamdam saat diwawancarai usai Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan PPU 2023, Senin (18/9/2023).**

Namun, ada beberapa larangan, seperti melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah, dan membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Masa jabatan Penjabat Bupati PPU ini akan berlangsung selama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pelantikan dan serah terima jabatan direncanakan akan dilaksanakan pada Selasa (19/9/2023) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim.

**BUPATI PPU TITIP 'SERAMBI NUSANTARA'**

Bupati PPU Hadam Pongrewa secara langsung telah bertemu dengan Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu. Ia mengungkapkan ada beberapa hal yang sempat dibahas.

"Dalam pertemuan itu santai saja. Dalam pertemuan itu Kami bicara banyak hal," ujarnya saat diwawancarai usai Paripurna pengesahan APBD Perubahan PPU 2023, Selasa (18/9/2023).

Satu hal yang banyak dibahas, lanjut Hamdam, ialah soal progres pembangunan Ibu Kota Nusantar (IKN) di Kecamatan Sepaku. Dalam hal ini, keduanya telah bersepakat bahwa perwujudan rencana Presiden Jokowi itu tetap perlu dilanjutkan tanpa hambatan.

"Tentang progres pembangunan IKN. Dan memang Kita bersepakat bahwa akan saling bahu-membahu untuk memastikan bahwa IKN itu akan berpindah dengan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden," ungkapnya.

Satu hal yang juga dititikberatkan Hamdam dalam perbincangan di Jakarta itu ialah persiapan PPU. Yang terangkum dalam city branding 'Serambi Nusantara'.

Menurutnya, ini satu hal yang nantinya juga harus diperjuangkan Makmur dalam memimpin PPU. Melanjutkan setiap program pemerintahan, yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat PPU dalam menyongsong IKN.

"Saya sampaikan juga soal Seram-

**MENTERI DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**


**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**  
**NOMOR 100.2.1.3 - 3720 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENJABAT BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali kota, dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah perlu dilakukan pengisian kekosongan jabatan bupati atau wali kota yang



**KEPUTUSAN MENDAGRI PJ BUPATI PPU**

- "Mengangkat Saudara: **Drs. MAKMUR MARBUN, M. Si.** sebagai Penjabat Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur."
- "Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU: selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama..."
- "Masa jabatan Penjabat Bupati Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan."

**Keputusan Menteri Dalam Negeri ini diharapkan dapat memberikan kestabilan dan kelancaran dalam pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga pemilihan bupati definitif dapat diselenggarakan.**

bi Nusantara, bahwa karena PPU ini tidak menjadi dari IKN. Ya Kita harus juga menyiapkan diri. Harus mempersiapkan Kita mau jadi apa, setelah IKN

itu pindah nanti," terangnya. (SBK/MK)

Penulis: Robbi Sya'an  
Editor: Agus/Nicha



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

# GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE  
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure\_samarinda 0811 - 551 - 6000

[all.accor.com](https://all.accor.com)



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah saat memenuhi undangan Kesbangpol dalam sosialisasi partisipasi perempuan.

## Tingkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan, Najirah: Hak Suara Perempuan Harus Diakomodir

**BONTANG** – Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memberikan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih perempuan bagi organisasi wanita yang ada di Bontang. Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu serentak tahun 2024.

Wakil wali Kota Bontang, Najirah mengatakan peran perempuan sangat dibutuhkan pada saat Pemilu 2024 mendatang. Hak suara perempuan juga harus diakomodir dalam pemilihan umum.

"Perempuan memiliki peran dalam menjagastabilitas. Dengan begitu hak suara perempuan dapat diakomodir," jelas Najirah, Senin (18/9/2023) saat pembukaan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di pendopo rumah jabatan wali Kota Bontang.

Lanjut Najirah sosialisasi ini juga merupakan komitmen organisasi perempuan dalam meningkatkan

peran perempuan dalam Pemilu serentak mendatang. "Ini juga merupakan upaya dalam memperkuat peran serta perempuan untuk demokrasi di Kota Bontang," kata Najirah.

Selain pelaksanaan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih perempuan, Najirah mengatakan peran perempuan selalu dibutuhkan dalam kestabilan pelaksanaan Pemilu. "Memastikan suara perempuan didengar dan hak-hak perempuan dilindungi," ungkapnya.

Plt Kabid Poldagri dan Ormas, Kesbangpol, Isnaini mengatakan sosialisasi dimaksudkan dengan tujuan mendorong kesadaran dan meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu serentak tahun 2023. "Kita menyadari pentingnya suara pemilih perempuan dalam menciptakan Pemilu damai di Kota Bontang," katanya.

Ia menambahkan bahwa dari data yang dimiliki Kesbangpol ada lebih kurang 63.495 pemilih perempuan

yang memiliki peran pada saat Pemilu 2024. "Memberikan pemahaman dan informasi kepada pemilih perempuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu serentak 2024," ungkapnya.

Erwin ketua KPU Bontang menjelaskan ada beberapa syarat dalam memilih yakni sudah berusia 17 tahun dan sudah menikah. Ia juga mengatakan ada 3 kategori pemilih seperti DPT, DPTb dan Daftar Pemilih Khusus. "Beberapa kategori pemilih ini dapat memilih pada saat hari pemilihan dan pemungutan suara. Namun sesuai dengan aturan yang telah ada," kata Erwin.

Erwin mengatakan sosialisasi seperti ini juga sebagai salah satu cara memberikan pemahaman kepada masyarakat. "Ada syarat dalam saat memilih dan menggunakan surat suara," jelasnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo  
Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang mengusulkan kenaikan insentif RT.

## Tambahan Insentif RT Dipastikan Naik Oktober 2023, Segini Besarannya!

**BONTANG** – Legislatif kembali menyuarakan usulan kenaikan insentif perangkat RT, guru mengaji, hingga Kader Posyandu. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang usai rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Menurut BW sapaan akrabnya, usulan tersebut disampaikan kembali lantaran mereka kerap menanyakan kepastian kapan Insentif itu bisa segera diberikan

“Mereka sudah sering menanyakan insentif ini kepada saya. Saya tidak bisa jawab karena memang belum bisa memberikan kepastian.

Saya minta tindak lanjutnya ini pemerintah seperti apa,” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini insentif yang diterima oleh jajaran RT saat ini berkisar Rp1 juta, sedangkan besaran insentif untuk para kader dan guru mengaji saat ini ialah Rp150 ribu.

Menurutnya insentif itu masih terlalu kecil sehingga perlu ditambah. “Harus ditambah, terlalu kecil itu. Ini juga akan sebagai bentuk perhatian pemerintah,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Basri menyebutkan akan menaikkan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan. Artinya, insentif yang akan diterima sebesar Rp1,1 juta.

“Tambahan Insentif RT kita rata semua Rp 100 ribu termasuk kader posyandu dan guru-guru ngaji,” tandasnya.

Diketahui, saat ini Pemkot Bontang sudah memastikan akan menaikkan insentif RT di Oktober 2023 ini senilai Rp 100 ribu. Perangkat RT itu terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, realisasi dengan insentif baru akan dilakukan pada Oktober 2023. Karena alokasi anggaran masuk dalam APBD Perubahan 2023 yang baru saja diketuk Rp 2,5 triliun. (al/adv)



ISTIMEWA

Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam dukung rencana Gusung jadi objek wisata.

## Rencana Gusung Jadi Objek Wisata, Rustam: Benahi Infrastrukturnya Dulu!

**BONTANG** - Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, mendukung rencana pemerintah menjadikan Pulau Gusung sebagai objek destinasi wisata baru di Kota Bontang. Tetapi dirinya meminta agar infrastrukturnya dibenahi terlebih dulu.

"Saya pribadi dukung rencana itu. Potensi sumber daya dan kearifan lokal di Pulau Gusung sangat potensial dimanfaatkan lebih maksimal," ujarnya beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, upaya ini sejalan dengan visi misi Pemkot Bontang untuk meningkatkan pendapatan UMKM dan pariwisata Bontang.

Karenanya dia meminta agar pemerintah daerah bisa segera membenahi infrastruktur sarana dan prasarana di Pulau Gusung, sehingga layak dijadikan sebagai lokasi wisata.

Menurutnya, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang sejalan dengan rencana pengembangan potensi wisata di sana.

"Jangan sampai kita mau kembangkan wisatanya, tapi masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan justru diabaikan," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemu-

da, Olahraga, dan Pariwisata (Kadispopar) Bontang, Ahmad Aznem mengatakan, rencana pengembangan potensi wisata Pulau Gusung saat ini tengah digodok.

Adapun tahap kajian Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) Pulau Gusung hampir rampung.

"Semua daerah yang berpotensi itu akan kami kembangkan. Seperti Tihi-Tihi dan Selangan. Kami inginnya bisa seperti Malahing juga," terangnya. (al/adv)



ISTIMEWA

RDP Komisi IV DPRD Kukar bersama Disdikbud Kukar.

## RDP Bersama Disdikbud, Soroti Realisasi Target yang Masih Minim

**TENGGARONG** - Sejumlah catatan penting diberikan oleh Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), evaluasi kegiatan di APBD Kukar 2023 murni dan APBD Perubahan Kukar 2023.

Berdasarkan paparan data yang disampaikan Disdikbud Kukar melalui Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), memasuki bulan September 2023, realisasi pencapaian baru memasuki angka 85 persen. Realisasi ini dianggap minim, dengan alasan belum maksimalnya penagihan dari pihak ketiga.

"Karena dari perusahaan (pihak ketiga) belum melakukan penagihan,

kalau ditagihkan itu tercapai 85 persen," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin, Senin (18/9/2023).

Baharuddin menyebut, seharusnya Disdikbud Kukar bisa mencapai realisasi anggaran sebesar 95 persen. Karena pengerjaan APBD Perubahan Kukar 2023 yang dimulai pada Oktober ini.

Tugas berat pun dianggap Baharuddin, menanti Disdikbud Kukar. Mengingat adanya peningkatan anggaran hingga Rp 500 miliar di APBD Perubahan Kukar 2023 ini. Dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2 triliun.

Komisi IV DPRD Kukar pun mencatat ada beberapa kendala yang disampaikan oleh Disdikbud Kukar. Di antaranya, kurangnya Sumber

Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, terutama di posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Maka dari itu, mendorong Disdikbud Kukar untuk melakukan penganggaran peningkatan SDM. Agar kekurangan SDM yang menjadi keluhan Disdikbud Kukar, bisa teratasi.

"Supaya ke depan tidak ada alasan kurang SDM lagi, sehingga keterlambatan kegiatan tidak ada lagi. Tentu dengan peningkatan di perubahan ini betul-betul memaksimalkan program kegiatan di Disdikbud," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari





ISTIMEWA

RDP Komisi IV DPRD Kukar bersama Disdikbud Kukar.

## Komisi IV DPRD Kukar Kritisi Tertundanya Sejumlah Kegiatan Fisik Disdikbud

**TENGGARONG** - Sejumlah kegiatan fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar yang direncanakan pada tahun 2023, harus ditangguhkan. Lantaran terbentur waktu pengerjaan di APBD Perubahan Kukar 2023 yang terbilang singkat. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar, bersama Disdikbud Kukar.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin mengungkapkan banyak kegiatan yang harus tertunda. Padahal kegiatan tersebut sudah tersusun dan terencana untuk dikerjakan pada tahun 2023. Bahkan dalam RDP ter-

ungkap, pengerjaan fisik terpaksa diganti dengan pengadaan untuk menyesuaikan waktu yang tersisa di 2023.

"Kegiatan fisik sudah direncanakan tapi tidak dilaksanakan, diganti dengan pengadaan, (dan) kami soroti itu. Alasannya waktu mepet," ujar Baharuddin, Senin (18/9/2023).

Baharuddin menekankan, Disdikbud Kukar harus memprioritaskan sejumlah kegiatan fisik yang memang ditangguhkan dalam APBD Perubahan Kukar 2023, menjadi pekerjaan prioritas di tahun anggaran 2024. Karena kegiatan fisik yang direncanakan, diketahui merupakan

kebutuhan.

Di antaranya, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di sejumlah wilayah. Seperti di Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak, dan Samboja. Karena kalau tidak terlaksana, tentu berakibat kepada kurangnya pemenuhan fasilitas belajar mengajar para siswa.

"Tahun 2024 harus prioritas untuk pembangunan fisik, kami tekankan itu. Karena banyak anggaran fisik yang dicoret," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i  
Editor : Nicha Ratnasari



## BPSDM Akan Gelar Sharing Session Online untuk Umum, Hadirkan Peneliti dari BRIN

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) akan menggelar Sharing Session secara daring untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada hari Selasa (19/9/2023) besok.

Kali ini, sharring session tersebut menggunakan aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube BPSDM Kaltim pada pukul 10.00 - 12.00 Wita. Setiap peserta yang mengikuti kegiatan lewat aplikasi Zoom akan diberikan sertifikat pelatihan.

Pada Sharing Session ke-42 yang bertema "Menimbang Peluang dan Tantangan Bagi ASN" akan menampilkan narasumber dari peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rusli Cahyadi, Phd

Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi M.AP, berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat menyerap materi yang disampaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa menambah pengetahuan baru. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

**Momen seseorang Widaiswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Kaltim Imran MSi, saat mengikuti Sharing Session secara online.**



Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi dalam rangkaian Sharing Session BPSDM dari aplikasi ZOOM.

**BERKORONG NOMBORASIRAL UNTUK SELURUH ASN DAN MASYARAKAT**

**SHARING SESSION**

**PEMBANGUNAN IKN :**  
"Menimbang Peluang dan Tantangan Bagi ASN"

Selasa, 19 September 2023  
Pukul 10.00 - 12.00 Wita  
09.00 - 11.00 WIB

**Sambutan**  
Dra. Nina Dewi, M.AP  
Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

**Moderator**  
Yoyok Setyo Langgeng, M.Si  
Widyaiswara BPSDM Kaltim

**Narasumber**  
Rusli Cahyadi, PhD  
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

REGISTER NOW   
<https://bit.ly/shkbpsdmkaltim>

ID : 838 110 7674  
Pass : bpsdm

 BPSDM KALTIM

Terbuka Untuk Umum | Gratis e-Sertifikat



HANAFI

Pengunjung perpustakaan Kaltim saat mencoba Buncu Baca Etam.

## DPK Kaltim Salurkan 6 Unit Buncu Baca Etam ke Kubar dan Mahulu

**SAMARINDA** - Sebagai langkah mempercepat peningkatan literasi di daerah hulu sungai Mahakam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyalurkan ajungan baca atau Buncu Baca Etam Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu). Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltim langsung pada 13 September 2023 lalu.

Dua kabupaten yang terletak di ujung barat provinsi Kaltim tersebut masing-masing mendapat 3 unit Buncu Baca Etam, hal ini dikatakan oleh

"Masing-masing dapat 3, untuk di perpustakaan kabupaten Kubar, Kantor Bupati dan untuk dermaga Melak - Samarinda. Untuk di Mahulu 3 unit diserahkan kepada Kesra Kabupat-

en Mahulu," terang Pustakawan Ahli Muda Patimah Irni SPd MSi kepada MediaKaltim.com, Senin (18/9/2023).

Dia menjelaskan, karena kondisi sangat jauh dari perkotaan, masyarakat di daerah hulu sungai Mahakam mengaku sangat terbantu dengan Buncu Baca Etam. "Masyarakat malah minta diperbanyak yang minta setiap kecamatan, karena sangat membantu bagi mereka yang ingin buku bacaan," ujar Irni.

Sementara itu, Kepala Bidang Layanan, Otomasi, dan Kerjasama, DPK Kaltim Dra. Hj. E. Mustika Wati, MM mengatakan penyerahan ini untuk kesekian kalinya dilakukan demi memenuhi kebutuhan bahan bacaan untuk mencerdaskan masyarakat yang tinggal hulu sungai Mahakam.

"Iya kami berharap, Buncu baca

Etam bisa menjadi pilihan alternatif sebagai bahan bacaan," ujarnya

Adapun koleksi buku digital yang dimiliki Buncu Baca Etam yang bisa didownload sebanyak 600 koleksi buku yang terdiri dari berbagai macam judul buku.

Pengguna Buncu Baca Etam dapat menggunakan fasilitas ini secara gratis, melalui cara scan QR Code yang tersedia pada mesin Buncu Baca Etam.

Pengguna juga dapat bebas memilih buku seperti buku cerita anak, pengetahuan umum, kesehatan dan koleksi buku lainnya.(adv)

Penulis : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Seluruh peserta TDUP dan Dispopar berfoto bersama usai sosialisasi.

## Dispopar Adakan Sosialisasi TDUP untuk Pelaku Sektor Wisata

**BONTANG** - Bidang Pariwisata Dispopar Bontang mengadakan sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Rabu (13/9/2023) lalu bertempat di Ruang Rapat Dispopar Bontang.

Kegiatan ini mengundang para pelaku sektor pariwisata Kota Bontang seperti jasa perjalanan wisata, penyedia akomodasi, jasa penyedia makanan/minuman dan lainnya. Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dispopar Bontang, Rita Atin Widiarti.

Sekretaris Dispopar Bontang menyampaikan, kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik untuk para pelaku sektor pariwisata mengetahui pentingnya TDUP, sehingga bisa meningkatkan daya saing usaha pariwisata khususnya di Kota Bontang.

"Manfaat yang didapatkan oleh pelaku usaha dari TDUP ini yaitu, memiliki legalitas resmi yang diakui pemerintah, mendapat perlindungan hukum dalam berusaha, bisa dimanfaatkan sebagai syarat dalam

melaksanakan uji kompetensi usaha dan profesi yang dilakukan oleh LSP," beber Rita.

Ditambahkannya, adanya TDUP juga memudahkan pelaku usaha untuk bisa mengajukan proposal kegiatan juga tender ke para konsumen.

Adapun narasumber yang dihadirkan di antaranya dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Imam Rusdi Hidayat dan dari Politeknik Negeri Samarinda, I Wayan Lanang Nata. (al/adv)

Koran  
DIGITALMEDIA  
KALTIM.com

Lebih Dekat dengan Satu Klik



<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN  
CP. 0811 5405 033



media\_kaltim



mediakaltimdotcom



mediakaltim.com



media kaltim



# PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From **Rp15.000** nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Keju



Teh Tarik Spirit

## BEBAS PILIH MENU !

\*syarat dan ketentuan berlaku

[www.hotelgrandkartika.com/inspirasi](http://www.hotelgrandkartika.com/inspirasi)

# DPRD Apresiasi 6 Proyek Perubahan Reformer

**TANJUNG REDEB** - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau Madri Pani mengapresiasi enam proyek perubahan yang telah diluncurkan Pemkab Berau, milik 6 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN).

Madri berharap ke depan supaya para peserta PKN dapat bekerja lebih profesional, inovatif dan kreatif dalam mengembangkan proyek perubahan sesuai yang sudah diluncurkan hari ini. "Tentunya untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati Berau dalam membangun Berau," ucapnya, Senin (18/9/2023).

Dirinya menilai semua proyek perubahan yang telah dipaparkan sudah cukup bagus, sebagai inovasi untuk perbaikan pelayanan pemerintahan yang semakin baik untuk masyarakat.

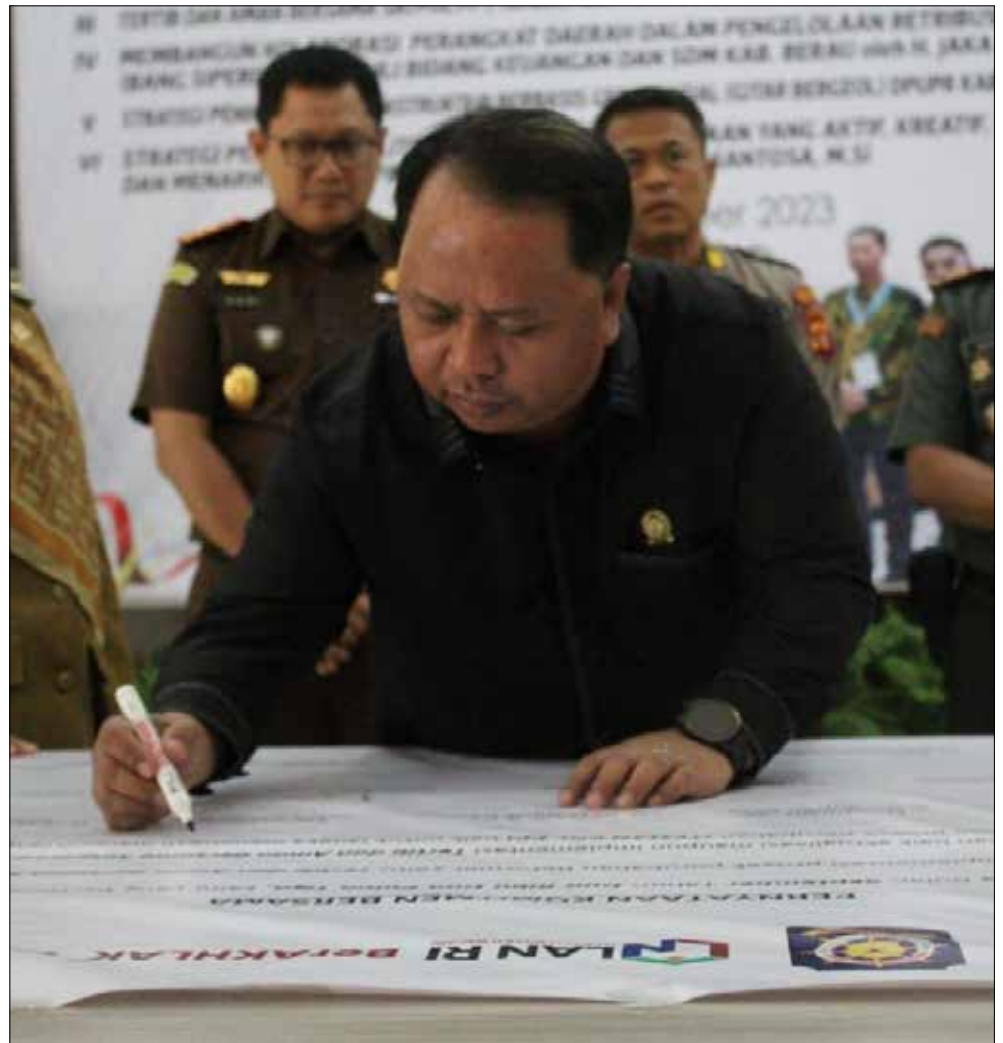
Namun, satu proyek perubahan yang menjadi perhatiannya yakni Strategi Peningkatan Infrastruktur Berbasis Geospasial atau disingkat Gitar Bergeol oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau dari Fendra Firnawan.

Menurutnya, ide Kepala DPUPR Berau tersebut sangat bagus. Karena mampu mengedepankan hubungan internal dan eksternal melalui proses dari bawah.

"Kalau saya melihat idenya sangat bagus. Apalagi dapat mengefisienkan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang mana dapat mempercepat serapan anggaran daerah," ungkapnya.

DPUPR sendiri tahun ini mengelola APBD terbesar diantara instansi lain yakni sebesar Rp 1,5 triliun. Disadari Madri, untuk mengelola anggaran yang sangat besar butuh kerjasama dan sinergitas antara bawahan dengan atasan. Supaya pekerjaan benar-benar lebih detail dan teliti.

Secara khusus Madri juga mendorong para kepala dinas lainnya dalam membuat ide atau gagasan yang diimplementasikan dalam sebuah inovasi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tentunya untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati Berau menjalankan roda pemerintahan.



**Ketua DPRD Berau Madri Pani melakukan penandatanganan kesepakatan bersama untuk mendukung kelanjutan proyek perubahan salah satu reformer.**

Terpisah, Kepala DPUPR Berau Fendra Firnawan menjelaskan, proyek perubahan Gitar Bergeol miliknya merupakan strategi perencanaan skala besar dengan pengumpulan data-data terkait rencana yang pernah dibuat maupun rencana yang belum pernah ada pada suatu jenis kegiatan infrastruktur di kabupaten Berau.

"Strategi perencanaan dikelola secara digital berbasis teknologi informasi agar dapat mengefisienkan waktu, biaya, kuantitas, kualitas," terangnya.

Adapun inovasi yang digunakan yakni menggunakan software Autodesk Civil 3D. Telah memiliki fasilitas dan fleksibilitas untuk perencanaan jalan yang sangat memudahkan karena dapat diperbaharui secara real time atau waktu sebenarnya. Strategi tersebut diharapkan

dapat mempercepat penyusunan perencanaan.

Tujuan dalam jangka pendek terdapat gambaran perencanaan infrastruktur secara digital di pilot project pada Kecamatan Kelay dan Kecamatan Pulau Derawan. Yang merupakan lokasi titik andalan wisata bahari maupun sejarah purba kala. Serta tersusunnya kebijakan strategis tentang perencanaan infrastruktur berbasis geospasial.

"Sedangkan, jangka panjangnya dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur secara cepat, tepat dan up to date yang sesuai kebutuhan, berbasis data yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi," tandasnya.

Pewarta: Amnil Izza  
Editor : Nicha Ratnasari



Penandatanganan kesepakatan mendukung proyek perubahan milik Kepala Disbun Berau, Lita Handini.

## Inovasi Perbaiki Layanan, Pemkab Luncurkan 6 Proyek Perubahan

**TANJUNG REDEB** - Bupati Berau Sri Juniarsih meluncurkan 6 proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dari Kabupaten Berau. Hal ini diharapkan menjadi inovasi untuk perbaikan layanan yang semakin baik untuk masyarakat.

Sri Juniarsih memaparkan, proyek perubahan yang pertama yakni Kolaborasi Pengembangan Kakao untuk Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Berau atau disingkat Si Bang Koko Mantap oleh Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Lita Handini. Ini merupakan upaya kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam hal ini Dinas Perkebunan dan OPD terkait lainnya, bersama dengan pihak perusahaan swasta, mitra pembangunan (NGO), MPIG, dan perbankan dalam memberikan dukungan pengembangan produk

olahan makanan berbahan coklat untuk mendukung sektor pariwisata.

Yang kedua, proyek perubahan berjudul Peluang Integrasi dan Kolaborasi untuk Transformasi Investasi di Kabupaten Berau atau disingkat PIKATI oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu (DPMPSTP) Berau, Nanang Bakran. Ini merupakan inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Berau yang terintegrasi dengan kolaborasi berbagai pihak dalam satu wadah yang bernama Mall Pelayanan Publik (MPP). Diharapkan dapat menciptakan dunia investasi dan berusaha di Kabupaten Berau menjadi lebih baik.

Yang ketiga, Proyek Perubahan berjudul Strategi Peningkatan Infrastruktur Berbasis Geospasial atau disingkat Gitar Bergeol oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau Fendra Firnawan. Di mana, Gitar Bergeol ini merupakan terobosan dalam memanfaatkan teknologi geospasial untuk mempercepat masa perencanaan infrastruktur secara menyeluruh tanpa mengurangi ketelitian. Sehingga, memberi keleluasaan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan supaya dapat terlaksana secara maksimal.

Yang keempat, Proyek Perubahan berjudul Tertib dan Aman Bersama Satpol PP atau disingkat Teman Pol PP oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Berau, Anang Saprani. Inovasi ini merupakan sosialisasi berkelanjutan dalam hal penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan aturan lainnya, yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Yang kelima, Proyek Perubahan berjudul Strategi Peningkatan Literasi melalui Perpustakaan yang Aktif, Kreatif, Edukatif, dan Menarik atau disingkat Si Pena Pakem oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berau Yudha Budi Santosa. Adalah proyek perubahan yang menghadirkan konsep perpustakaan yang aktif berkegiatan, mengasah kreativitas dan mengedukasi pengunjung, sehingga meningkatkan daya tarik perpustakaan.

“Si Pena Pakem ini juga bersinergi dengan perangkat terkait untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca dan literasi masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya, Senin (18/9/2023).

Terakhir, Proyek Perubahan berjudul Membangun Kolaborasi Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Retribusi Daerah atau disingkat Bang Si Perda oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM Jaka Siswanto. Adalah inovasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau di bidang Retribusi Daerah dan mewujudkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan, den-

gan memaksimalkan pemungutan retribusi sesuai potensi yang ada untuk peningkatan PAD, memberikan kemudahan layanan khususnya bagi pelaku UMKM, hingga meminimalkan kebocoran retribusi.

“Saya minta para reformer untuk memastikan kesiapan sumber daya pelaksana proyek perubahan ini sekaligus memastikan keberlanjutan dan target pencapaiannya,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Disbun Berau Lita Handini menjelaskan, proyek perubahan yang dibuatnya berdasarkan analisisnya bahwa setiap tahun luas lahan kakao di Berau semakin berkurang. Pada tahun 2018 luasnya mencapai 2.475 hektare, dan sekarang tinggal 1.003 hektare saja.

Sehingga, pihaknya perlu melakukan langkah untuk mempertahankan luas lahan yang ada. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk melakukan pembinaan dan dukungan kepada petani kakao Berau sehingga mereka merasa dibimbing dan didukung.

“Jadi para petani bisa tetap konsisten mengembangkan kakaonya itu,” ucapnya.

Di samping itu, pihaknya akan meng-SK-kan sekitar 600 hektare lahan kakao yang dipetakan di Kabupaten Berau soal penetapan lahan kawasan. Yang mana akan diprioritaskan untuk didukung dengan berbagai bantuan dari pemda.

“Jadi di situ sudah jelas bantuannya apa dan berapa karena lahannya sudah tercatat dalam SK Bupati,” urainya.

SK tersebut diungkapkannya masih diproses. Yang targetnya akan dirampungkan pada September ini. Lahan potensial selain yang akan tercatat dalam SK juga tetap dipetakan. Untuk dipertahankan dan tidak pindah komoditas.

Sehingganya, tahun depan setelah SK penetapan lahan kawasan kakao, akan dibentuk tim untuk melanjutkan kegiatan pemetaan lahan potensial kakao lainnya.

“Lahan potensi yang lahannya jelas dan petaninya punya niat untuk mengembangkan kakao. Siapa tahu sebanyak 1.003 hektare lahan kakao yang ada bisa dipetakan semua,” tandasnya.

Pewarta: Amnil Izza

Editor : Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000\_bontang —

**LET'S TEST DRIVE!**

**EZ Deal**  
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

**DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE**

**AUTO2000 BONTANG**  
Jl. Binger Kalimas No. 116A, Sebeling Dc, Bontang Barat  
Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive  
Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD  
APLIKASI M-TOYOTA

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!





Monitoring Ditreskoba Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan di Posko Kampung Bebas Narkoba di Balikpapan Barat.

## Kampung Bebas Narkoba Efektif Tekan Peredaran Narkoba di Balbar

**BALIKPAPAN** - Wilayah Gunung Bugis yang berada di Balikpapan Barat terkenal dengan maraknya peredaran narkoba jenis sabu. Sejumlah upaya pun dilakukan jajaran kepolisian, BNN hingga pemerintah kota untuk mengentaskan peredaran narkoba tersebut.

Kampung Bebas Narkoba pun hadir di Gunung Bugis, Balikpapan Barat untuk memberantas peredaran narkoba tersebut. Dua kampung bebas narkoba pun telah diluncurkan jajaran Polresta Balikpapan sejak 2019 lalu dan kini sudah ada berjumlah 2 kampung yang dideklarasikan sebagai kampung bebas narkoba.

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim, AKBP Fajar Nuardimi mengatakan, sejak adanya kampung bebas narkoba peredaran narkoba

di Gunung Bugis bisa ditekan. Bahkan program dan sosialisasi yang digalakkan Polres dan jajaran terus dilakukan untuk mencegah adanya peredaran narkoba.

"Sangat efektif sekali, terbukti peredaran narkoba semakin berkurang di sini," ujarnya, Senin (18/9/2023).

Lebih lanjut Fajar menjelaskan, tingkat keberhasilan penekanan narkoba di wilayah Balikpapan Barat ini sebesar 80 persen.

"Kalau kita terus menjalankan program dan sosialisasi terus dilakukan tidak menutup kemungkinan bisa zero peredaran narkoba," jelasnya.

Sementara itu salah seorang anggota Pokja Pemberantasan Narkoba wilayah Balikpapan Barat, Umar Saleh mengatakan, sebanyak 3 RT di kawasannya saat ini telah bebas

dari peredaran narkoba. Padahal sebelumnya banyak terjadi peredaran narkoba dikawasannya.

"Sebelum ada kampung bebas narkoba ini RT 9, RT 10 dan RT 15 ini banyak ditemukan peredaran narkoba. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi," ujarnya.

Saat ini Pokja Pemberantasan Narkoba wilayah Balikpapan Barat akan terus menggenjatkan program dan sosialisasi pencegahan narkoba di wilayah Balikpapan Barat pada umumnya dan Balikpapan khususnya.

"Sampai akhir tahun ini kita sudah siapkan program dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di wilayah kita," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Korban pemukulan, Nuruddin saat mendatangi Makopolresta Balikpapan, Senin (18/9).

## Aksi Premanisme Terjadi di Balikpapan, Korban Dipukuli hingga Berdarah

**BALIKPAPAN** – Aksi premanisme terjadi di Kota Balikpapan pada Sabtu (16/9/2023). Di mana korban bernama Nuruddin (53) mengalami luka lebam pada bagian wajahnya hingga harus menerima 5 jahitan.

Korban yang ditemui di Polresta Balikpapan pada Senin (18/9/2023) mengatakan, saat kejadian dirinya sedang berjalan-jalan di sekitar lahannya yang berada di Jalan Al Makmur RT 32 Kelurahan Damai, Balikpapan Kota.

“Tahu-tahu datang 2 orang nanya saya, Nuruddin ya? Saya jawab ia. Langsung saya dipukul berdua orang itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Nuruddin menjelaskan, ia pun tidak mengenali kedua orang yang telah memukulinya hingga berdarah-darah. Bahkan warga yang melihat langsung meleraikan keja-

dian tersebut.

“Karena masih sore, sekitar jam 5-an, saya langsung lapor ke Polres. Baru diarahkan ke rumah sakit untuk membuat visum,” jelasnya.

Korban mengaku sejauh ini tidak memiliki masalah dengan siapapun. Bahkan terkait hal apapun. Untuk itu, ia meminta kepolisian dapat mengungkap kasus ini dan mengamankan pelakunya.

“Saya tidak pernah ribut atau bermasalah sama orang, makanya saya kaget. Kok tiba-tiba dipukul. Saya berharap kepolisian bisa menangkap pelaku dan mengungkap aksi premanisme ini lah. Karena saya harus minta tolong ke siapa lagi kalau tidak ke polisi kan,” tambah Nuruddin.

Sementara itu, Kanit Jatanras Satriakrim Polresta Balikpapan, IPDA Wempy Ardeta saat dikonfirmasi

membenarkan adanya laporan dari korban perihal kasus pemukulan oleh orang tak dikenal.

“Iya ada. Hari Sabtu usai kejadian dia langsung buat laporan di kami,” ujarnya.

Wempy menambahkan, atas laporan tersebut hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sedikitnya 3 orang. Dan sudah mendapatkan ciri-ciri dari kedua pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban.

“Sudah ada saksi yang kita periksa. Ada 3, warga disaat kejadian dan Pak RT setempat. Kita juga sudah identifikasi ciri-ciri pelakunya. Dan saat ini dalam tahap penyelidikan kami,” tutupnya. **(Bom)**

Penulis: Aprianto  
Editor: Agus Susanto



Polisi melakukan tindak preventif saat digelarnya operasi Zebra Mahakam beberapa waktu yang lalu.

## Tilang Manual Dominasi Operasi Zebra Mahakam 2023 di Balikpapan

**BALIKPAPAN** - Operasi Zebra Mahakam 2023 resmi berakhir pada 17 September 2023 kemarin. Dari operasi yang digelar masih banyak pengendara di Kota Balikpapan yang melakukan pelanggaran.

Kasatlantas Polresta Balikpapan, Kopol Ropiyanı mengatakan, selama dua pekan berlangsung jajarannya telah mengeluarkan sebanyak 406 surat tilang kepada pelanggar.

"Dari jumlah itu ada dua tindakan yaitu secara E-TLE (Elektronic Traffic Law Enforcement) maupun manual," ujarnya, Senin (18/9/2023).

Lebih lanjut Ropiyanı menjelaskan, yang mendominasi dari angka itu adalah penilangan manual. Disebutkannya selama operasi polisi menindak sebanyak 364 pelanggar. "Kalo untuk E-TLE terdapat 42 pelanggar," jelasnya.

Dalam operasi Zebra Mahakam polisi juga lebih mengedepankan tindakan preventif, artinya tidak semata melakukan penilangan di

lapangan.

Lebih lagi, hanya terdapat 7 pelanggaran prioritas yang menjadi target dalam operasi ini, seperti tidak menggunakan helm SNI, pengendara melawan arus, pengendara di bawah umur, berkendara di bawah pengaruh alkohol alias mabuk.

Kemudian pengendara melanggar rambu lalu lintas, pengendara tanpa safety belt untuk roda empat, serta berkendara lebih dari dua orang untuk roda dua.

"Ketujuh pelanggaran prioritas itu masuk kedalam pelanggaran serius yang berpotensi terhadap fatalitas jika terjadi kecelakaan," tambahnya.

Maka, jika pelanggarannya tidak serius atau tidak berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan polisi lebih mengutamakan tindakan preventif atau hanya memberikan teguran, baik lisan maupun tertulis, serta memberikan edukasi kepada warga. "Untuk teguran tertulis selama Operasi Zebra kami menghimpun ada 667

tegaran," ujar Ropiyanı lagi.

Dirincikannya, dari 667 teguran secara tertulis terdapat 127 pelanggar dan 540 kasus untuk teguran secara lisan.

Dari keseluruhan pelanggaran yang tercatat oleh pihaknya itu diakui didominasi oleh pengendara roda dua dengan jenis pelanggaran seperti melawan arah, hingga berbelok di kawasan yang jelas dilarang.

Untuk mengantisipasi dan menekan angka pelanggaran lalu lintas di kemudian hari, polisi melakukan sosialisasi dengan menyebar flyer dan memasang spanduk tentang imbauan tertib berlalu lintas.

"Dan di malam harinya kami juga rutin melakukan patroli di beberapa kawasan yang dianggap rawan terhadap aktivitas balap liar oleh warga," tutupnya.

*Penulis: Aprianto*

*Editor: Nicha Ratnasari*



ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

Dandim 0908/Bontang, Letkol Inf Priyo Handoyo bersama jajaran saat memberikan bantuan dalam kunjungan ke purnawirawan.

## Hormati Jasa Prajurit, Dandim 0908/Bontang Kunjungi Rumah Purnawirawan dan Panti Asuhan

**BONTANG** - Dalam rangka menyambut HUT TNI yang ke-78, Kodim 0908/Bontang bersama jajaran melaksanakan kegiatan anjaksanaan ke rumah Purnawirawan dan Warakawuri serta Panti Asuhan di wilayah jajaran Kodim 0908/Bontang pada Senin (18/9/2023).

Kegiatan yang dihadiri oleh Dandim 0908/Bontang Letkol Inf Priyo Handoyo, didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XX, Mayor Inf. Masrukan (Kasdim 0908/Btg), Kapten Cpm. Agus Setiawan (Dansubdenpom VI/1-1 Bontang), Lettu Arh Kuntoro (Danrai A Den Arhanud 002/ABC), Letda Mar Koko Hamsyah (Danposal Bontang), Para Perwira Staf, Ketua Persit KCK Ranting BS IV Den Arhanud - 002 PD VI/Mulawarman beserta Pengurus, Ketua Persit KCK Sub Anak Ranting 1-1 Anak 1 Denpom VI/1 Ranting 5 POM Cabang III PD VI/MIW.

Sasaran anjaksanaan ini dilakukan ke beberapa rumah anggota Purnawirawan dan Warakawuri antara lain ke Rumah Purnawirawan Serka Heri

Furyanto, Purnawirawan Serka Surtarto, Purnawirawan Peltu Sogi dan Ibu Ketut. Selain itu anjaksanaan juga dilakukan ke beberapa panti asuhan seperti Panti Asuhan Nurul Hidayah, Panti Asuhan Darul Aitem dan Panti Asuhan Nurul Hidayah.

Komandan Kodim 0908/Bontang Letkol Inf Priyo Handoyo mengatakan dilakukannya kunjungan atau anjaksanaan untuk menghormati prajurit yang telah mengabdikan diri dan jasanya di wilayah Kodim 0908/Bontang.

"Kegiatan anjaksanaan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT TNI ke-78 tahun 2023 dan merupakan salah satu bentuk kepedulian dan penghormatan atas jasa-jasa purnawirawan dan warakawuri yang telah mengabdikan kepada TNI terutama di wilayah Kodim 0908/Bontang," kata Letkol Priyo Handoyo.

Letkol Priyo Handoyo menambahkan selain kunjungan, pihaknya juga memberikan bantuan atau tali asih kepada purnawirawan dan warakawuri untuk keperluan keluarga.

"Dalam kesempatan ini kami juga menyerahkan bantuan maupun tali asih untuk membantu meringankan kebutuhan bagi para purnawirawan dan warakawuri. Oleh karena itu kami berharap apa yang kami berikan jangan dilihat dari segi materi tetapi lebih dimaknai sebagai upaya untuk mempererat ikatan tali kesetiakawanan sosial dan rasa kekeluargaan. Semoga bermanfaat," ujarnya.

Salah satu dari warakawuri, Ketut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kodim Bontang dan jajarannya yang telah melakukan kunjungan dan memberikan bantuannya.

"Terima kasih kepada Pak Dandim 0908/Bontang beserta jajarannya yang telah mengunjungi kami. Kunjungan ini merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi saya dan anak-anak saya. Kami sangat senang dan bangga mendapat kunjungan ini. Semoga balasan kebaikan diberikan kepada Dandim dan jajarannya," tuturnya.

Pewarta: Yahya Yabo  
Editor: Nicha Ratnasari

# Ini Cara Jitu KPU Bontang Tangkal Informasi Hoaks Jelang Pemilu 2024

**BONTANG** – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang memiliki cara dalam menangkal hoaks atau berita bohong mengenai menjelang Pemilu 2024.

Ketua KPU Bontang, Erwin, mengatakan saat ini perkembangan teknologi mengenai arus informasi tidak bisa dibendung. Namun KPU Bontang memiliki kanal-kanal seperti media sosial resmi KPU dalam memberikan informasi mengenai Pemilu terlebih mengenai berita hoaks.

“Perkembangan media yang sangat pesat terlebih media online. Ada juga media sosial yang menjadi tempat informasi. KPU juga memiliki akun

media sosial dalam memberikan sosialisasi dan informasi-informasi mengenai kepemiluan,” jelas Erwin kepada Mediakaltim.com, Senin (18/9/2023).

Erwin mengatakan terkait informasi-informasi hoaks yang beredar, ia mengatakan itu merupakan ranah dan wewenang komisi informasi yang harus melakukan tindakan.

“Kalau informasi hoaks di media sosial, saya pikir itu ranahnya komisi informasi yang memaksimalkan dan Bawaslu sebagai pengawas dalam melakukan tindakan,” kata Erwin.

Cara lain KPU, kata Erwin yakni dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dan mengimbau

kepada masyarakat ketika menemukan informasi hoaks untuk memberitahu atau melaporkan ke KPU Kota Bontang. Sebagai pengambil kebijakan, Komisioner melakukan arahan kepada staf-staf KPU.

“Caranya yakni untuk mengantisipasi atau mengimbau kepada masyarakat ketika mendapatkan informasi hoaks untuk mengecek atau memberitahukan akun resmi media sosial KPU atau bisa mendatangi langsung kantor KPU Bontang,” pungkas Erwin.

*Pewarta: Yahya Yabo  
Editor: Nicha Ratnasari*



SYAKURAH/RADARBONTANG

Proses pemindahan mayat A ke RSUD

## Mayat Pria Ditemukan di Rumah Kontrakan Wilayah Gunung Telihan

**BONTANG**- Mayat berjenis kelamin pria berinisial A ditemukan di dalam rumah kontrakannya, di Kelurahan Gunung Telihan di Jalan Denpasar 3, RT 09, Senin (18/9/2023).

Tetangga korban, Yuli Iskandar mengaku curiga saat A tidak keluar rumah pada jam 10.00 Wita, sehingga berinisiatif untuk membangunkan A untuk sekalian menawarkan sarapan pagi.

Namun, saat mengetok pintu beberapa kali tidak ada respon, sampai akhirnya ia masuk ke rumah tersebut. Ternyata, menemukan A sudah dalam keadaan

membiru dengan mulut mengeluarkan busa. “Saya masuk karena pintu juga tidak dikunci, ternyata pas masuk beliau sudah kaku,” jelasnya.

Tetangga korban mengakui bahwa A merupakan orang yang cukup tertutup, namun tetap bersosialisasi dengan warga sekitar. Ia juga sering meminta tolong kepada Yuli semisal ingin pergi berobat. Pada hari Minggu (17/9/23) sore kemarin, ia sempat ditawari istrinya nasi goreng dan memang kondisi A sudah mengeluh sakit kepala. Oleh sebab itu, pagi tadi Yuli turut berinisi-

atif menawarkan sarapan.

Diketahui, A sehari-harinya bekerja sebagai tukang lepas, dan aslinya juga warga Bontang Kuala. “Dia kemarin cuma bilang sakit kepala, tapi sebelumnya bilang kalau ada maag,” jelasnya. Saat ini jasad A dibawa ke RSUD Taman Husada Bontang untuk diautopsi. Paman A, Suharno mengatakan almarhum akan dikuburkan di pemakaman umum Bontang Kuala.

*Penulis: Syakurah  
Editor: Nicha Ratnasari*



SYAKURAH/RADARBONTANG

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemilih Organisasi Wanita Bontang Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

## Pentingnya Peran Perempuan dalam Pemilu 2024, Bantu Ajak Masyarakat ke TPS

**BONTANG** - Pada pemilu pada tahun 2022 lalu di Kalimantan Timur (Kaltim), hanya 70 persen masyarakat yang mengikuti pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 100 persen yang terdaftar memiliki hak pilih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Sigit Alfian mengatakan sosialisasi ini penting, karena diharapkan pada tahun 2024 mendatang 100 persen warga Kaltim yang memiliki hak pilih bisa menggunakan suaranya.

Di Kota Bontang sendiri terdapat 131.595 pemilih, pemilih laki-laki sebanyak 68.135 dan pemilih perempuan sebanyak 63.459.

"Kami inginnya masyarakat Kaltim bisa pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya," ungkapnya di Sosialisasi Peningkatan Partisipasi

Pemilih Organisasi Wanita Bontang Pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Senin (18/9/23).

Alasan Kesbangpol memilih organisasi wanita Bontang sebagai peserta yakni karena perempuan dinilai memiliki kekuatan untuk mengajak dan menyebarkan informasi kepada keluarga dan sekitarnya.

"Selain dengan teman dan lingkungan sekitar, seorang perempuan yang merupakan ibu rumah tangga diyakini pasti bisa memberitahu keluarganya untuk dapat pergi ke TPS saat pemilu nanti," bebarnya.

Ketika para pemilih hanya sedikit yang mau ke TPS, kinerja kesbangpol akan terlihat lemah karena tidak bisa merangkul masyarakat untuk melakukan pemilihan. Disadari selain ini sosialisasi pemilu hanya kepada kelompok masyarakat tertentu.

"Selain itu saya ingin menyampaikan kepada mereka juga untuk melakukan pemilu yang damai, saya yakin kalau perempuan sudah bicara pasti didengar dan dilaksanakan," tambahnya.

Dikatakan juga bahwa Kaltim ini rawan pemilu, artinya karena etnis yang begitu banyak, perpecahan lebih mudah terjadi jika tidak sependapat. Sehingga pendekatan akan semakin berat dan itu menjadi tugas Kesbangpol untuk menyatukan.

"Dengan melakukan pendekatan lewat para ibu-ibu rumah tangga ini diharapkan bisa mempersatukan kita semua, jadi pengunjung TPS juga bisa meningkat," harapnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Suasana persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong.

# Sidang Lanjutan Pengrusakan Lahan, Saksi Ahli PT MPAS Ditolak JPU

**TENGGARONG** - Sidang terdakwa Zulkifli, Direktur PT Mahakam Prima Akbar Sejati (PT MPAS), dengan tuduhan pengrusakan lahan di atas milik PT Budiduta Agromakmur (PT BDAM), berlanjut. Kini dengan agenda mendengarkan saksi ahli, yang dihadirkan oleh terdakwa pada Senin (18/9/2023) sore.

Saksi ahli yang diketahui berasal dari perusahaan Primacon Eksplore, diyakini oleh tim kuasa hukum terdakwa memiliki kompetensi dibidang perizinan. Mulai dari awal dokumen hingga akhir, sampai perusahaan pertambangan batu bara bisa memulai produksi.

Namun dalam perjalanannya, diketahui keterangan dari saksi ahli pun ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Yang menilai saksi ahli yang dihadirkan tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Lantaran JPU

menilai saksi ahli bukanlah praktisi maupun akademisi. Karena berasal dari perusahaan atau lembaga profit.

"Kalau dalam persidangan wajar, saksi ahli tidak diterima jaksa karena ada pertimbangan lain. Secara umum menolak saksi karena tidak memiliki kompetensi menyampaikan itu, versi kita memiliki kompetensi yang cukup jadi saksi," ujar Kuasa Hukum PT MPAS, Agus Talis Joni.

Agenda persidangan selanjutnya pun, dikatakan Agus Talis Joni, akan mendengarkan keterangan dari terdakwa Zulkifli pada pekan depan. Menjadi kesempatan terdakwa dan kuasa hukum untuk menggali dan mengungkapkan kejadian yang sebenarnya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong.

Sementara itu, saksi ahli yang dihadirkan terdakwa, Agus Siswanto,

menanggapi santai hasil persidangan yang berlangsung. Ia menyebut bahwa sudah berkecimpung di dunia perizinan selama 18 tahun, sejak 2005 silam. Bahkan ia pun melengkapi surat tugas, yang sebelumnya diminta oleh JPU pada persidangan pekan lalu.

"Saya dari 2005 sampai 2023, 18 tahun kemudian melakukan kegiatan proses perizinan pertambangan, apa yang disampaikan kuasa hukum tadi, saya bagian dari praktisi tersebut, dan kita juga melakukan proses perizinan," ujar Agus.

"Itu sebagai tolak ukur sebenarnya, ya kita kembalikan itu hak JPU," pungkasnya.

*Penulis : Muhammad Rafi'i*

*Editor : Nicha Ratnasari*



Penutupan kembali jalan keluar masuk kendaraan pengangkut batu bara, Sabtu (16/9/2023), di Desa Batuah, Dusun Karya Baru, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

## Pemilik Lahan Kembali Tutup Jalan Hauling di Desa Batuah

**KUKAR**-Didampingi kuasa hukumnya, pemilik lahan di Desa Batuah, Dusun Karya Baru, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara menutup kembali lahan yang digunakan sebagai jalan keluar masuk kendaraan pengangkut batu bara, Sabtu (16/9/2023).

Kuasa Hukum pemilik lahan, Rizky Febryan, SH mengatakan, penutupan itu dilakukan kembali setelah, palang kayu yang sempat dipasang pada Kamis (7/9/2023) lalu dibongkar paksa oleh oknum tak dikenal.

"Ini penutupan kedua, sebelumnya sudah dibongkar oleh oknum tidak dikenal," ujar Rizky, Senin (18/9/2023).

Rizky menjelaskan, bahwa kliennya itu memiliki lahan seluas 25 ribu meter persegi. Sementara lahan yang digunakan sebagai jalan keluar masuk kendaraan tersebut sepanjang 2,1 kilometer.

Namun selama beroperasi, kliennya tak sepeser pun mendapatkan haknya. Pihak perusahaan pun tak pernah menunjukkan itikad baik ke

pada kliennya selama melintas di lahan tersebut.

"Perusahaan harus mengetahui ketika beroperasi melakukan pertambangan ada hak hak masyarakat yang harus dipenuhi," jelasnya.

Sebelumnya, Rizky menerangkan bahwa sejumlah pertemuan sempat dilakukan dengan perwakilan dari perusahaan. Hanya saja, pada pertemuan 30 Agustus lalu tidak menemui titik temu antara kedua belah pihak. "Kita bahas hak hak klien kita dan kewajiban perusahaan tapi tidak ada titik temu," tambahnya.

Padahal, kliennya dalam hal ini pemilik lahan hanya meminta hak hak kliennya diberikan oleh perusahaan. Hak yang dimaksud yakni pemberian kompensasi atas penggunaan lahan sepanjang 2,1 kilometer yang dijadikan jalan keluar masuk kendaraan pengangkut batu bara.

"Sepengantungan kami sudah dipake sejak 2018, sudah 5 tahun mereka (perusahaan) beroperasi," tegasnya.

Rizky menambahkan bahwa, kliennya memiliki legalitas yang sah atas

kepemilikan lahan tersebut termasuk surat pernyataan pemilikan/penggunaan tanah (SPPT) yang telah teregister di kecamatan dan diketahui oleh kelurahan setempat.

"Kami masih lihat apakah perusahaan punya legalitas. Ada informasi status lahan ini HPL (hak pengelolaan atas tanah) kita buktikan, kita minta SK mana," ujarnya lagi.

Sementara terkait dengan pembongkaran paksa terhadap palang yang dilakukan sebelumnya, Rizky mengaku kliennya tidak di beritahu atau informasi terlebih dahulu dan hingga detik ini kliennya masih menunggu itikad baik dari perusahaan untuk melakukan pertemuan maupun mediasi lanjutan.

"Persoalan ini sederhana artinya hanya bicara hak klien kami, kita uji legalitas terhadap lahan ini, kita duduk bersama kita panggil pihak berwenang," tutupnya.

Penulis: Aprianto  
Editor: Nicha Ratnasari





## Pemerintah Apresiasi Dukungan Fraksi DPRD Kutim Terkait 2 Usulan Raperda

**SANGATTA-** Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan berupa masukan, kritikan dan saran atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi Daerah serta Ranperda Penyerahan Prasarana, Utilitas Umum Pada Kawasan Perumahan di Kutim. Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Poniso Suryo Renggono mewakili Bupati Kutim dalam sidang paripurna ke-5 DPRD pada Jumat (15/9/2023) lalu.

“Saran dan masukan dari Fraksi

DPRD Kutim menjadi masukan dan referensi yang sangat berharga dalam upaya pembentukan produk hukum daerah yang berkeadilan, memiliki asas manfaat, punya kepastian hukum yang tegas dalam pelaksanaannya di masyarakat,” ujar mantan Camat Rantau Pulung ini.

Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam Raperda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai tanggapan fraksi DPRD yakni, berkeadilan, transparan, semakin optimal, edukatif, rasional dan akuntabel serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Ini catatan penting bagi Pemkab Kutim,” jelas Poniso.

Terhadap Raperda Penyerahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pada Kawasan Perumahan, Pemkab Kutim diingatkan agar fasilitas yang diberikan harus memenuhi standar kualitas, menjadi payung hukum sehingga pengembangan kawasan perumahan menjadi sehat, aman, serasi dan teratur. Kemudian fasilitas yang diberikan bertujuan untuk sinergitas pengembangan wilayah.

“Kami (Pemkab Kutim) harapkan segera dilakukan pembahasan sehingga menjadi dasar hukum bagi OPD melaksanakan tanggung jawabnya,” singkat Poniso.

*Pewarta : Irfan Aditama  
Editor : Nicha Ratnasari*

## Nihil Tanggapan Masyarakat, KPU Paser Lanjut ke Proses DCT

**PASER** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser memastikan tidak ada tanggapan atau masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Paser, Ahyar Rosidi mengatakan, pihaknya tidak ada menerima tanggapan publik terhadap DCS yang diluncurkan pada 19 hingga 23 Agustus 2023, sesuai tahapan yang telah ditentukan. "Sampai dengan saat ini usai diumumkan para nama DCS, tidak ada tanggapan dan masukan masyarakat yang masuk ke KPU Paser," kata Ahyar.

Sehingga, diterangkan Ahyar, KPU Kabupaten Paser langsung fokus pada proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) terhadap 367 bacaleg menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang



**Komisioner KPU Kabupaten Paser, Ahyar Rosidi**

akan ditetapkan pada Oktober 2023 mendatang. "Jadi kita langsung ke proses penetapan DCT," terangnya..

Dalam proses penetapan DCT, KPU Kabupaten Paser akan melakukan pencermatan DCT. Di masa pencermatan DCT tersebut, memungkinkan para Partai Politik (parpol) bisa melaku-

kan pergantian Caleg tanpa menambah jumlah yang ada. "Jadi pada masa itu bisa melakukan pergantian namun tidak dapat melakukan penambahan nama Bacaleg dan untuk SK Pemberhentian tidak diperkenankan lewat dari tanggal yang telah ditetapkan," ujarnya.

Diketahui jumlah keseluruhan DCS sebanyak 367 bacaleg dari 17 parpol yang ada di Kabupaten Paser. Dari 17 Parpol tersebut sebanyak 8 parpol yang tidak memaksimalkan jumlah Bacaleg nya untuk maju di Pemilu 2024 yakni PKN, Buruh, PSI, Hanura, Perindo, Ummat, PBB, PPP.

Sementara kebutuhan kursi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Paser sesuai dapil, diantaranya Dapil 1: 9 kursi, Dapil 2: 8 kursi, Dapil 3: 7 kursi, Dapil 4: 6 kursi.

*Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari*

LET'S GO  
BANYAK!

# SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

\* TOYOTA MOTOR OIL

## Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE

PALING HEMAT

GUARANTEE

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

Bantuan Toyota lebih mudah!

# 941 PTT di Paser Bakal Ikut Seleksi PPPK

PASER - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser akan melakukan seleksi terhadap 941 Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). "Seleksi dilaksanakan secara bertahap, tahun ini kuotanya 941 pegawai," kata Kepala BKPSDM Kabupaten Paser, Suwito, Senin (18/9/2023).

Ia merincikan jumlah kuota sebanyak 941 itu terdiri dari 545 untuk formasi guru, 321 tenaga kesehatan dan 75 tenaga teknis. Suwito mengatakan saat ini jumlah PTT di Kabupaten Paser berjumlah 4.086 orang. Data itu diperoleh setelah proses penghimpunan secara bertahap.

Menurutnya seleksi P3K ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kepala daerah seluruh Indonesia untuk tidak memberhentikan PTT yang ada. "Artinya tidak ada pemutusan tenaga honorer atau PTT," kata Suwito.

Ia menegaskan, sistem pengangkatan pegawai berstatus P3K ini diatur pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi.

"Jadi semua aturan dari Badan Kepegawaian Nasional dan daerah hanya melaksanakan semua aturan yang sudah ditetapkan. Tugas kami hanya memeriksa berkas yang menjadi syarat para peserta yang diseleksi," ujar Suwito.

Ia menambahkan, pengangkatan pegawai berstatus



**Kepala BKPSDM Kabupaten Paser, Suwito**

P3K digelar secara bertahap dengan memprioritaskan pada kebutuhan aparatur di layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan pengangkatan P3K ini, diharapkan permasalahan tenaga honorer di Kabupaten Paser tuntas dan tidak ada lagi honorer kedepannya. "Untuk seleksi P3K saat ini difokuskan untuk PTT yang sudah ada karena selama ini menjadi keresahan," ucap Suwito.

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari



LET'S  
GO  
BEYOND



## BOOKING THS SAJA

# BTS

di Digiroom



DAPATKAN GRATIS 1<sup>st</sup> OLI TMO SYNTETIC  
SETIAP SERVICE BERKALA\*



**Kode Promo  
BTSOLI**

\*Syarat dan ketentuan berlaku

**Informasi - Call/WA :**

**Adi S : 0822-5435-0088**

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan  
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi





**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

**Bontang**



Bupati Paser, Fahmi Fadli menandatangani berita acara.

## Bupati Paser Terima Hibah 655 PJUTS dari Kementerian ESDM

**PASER** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melakukan penandatanganan berita acara serah terima hibah barang milik negara. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bupati Paser Fahmi Fadli bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan, kegiatan pembangunan PJUTS merupakan program dari Pemerintah Pusat yang manfaatnya sudah dirasakan masyarakat. "Pembangunan itu tidak lain guna kebutuhan

akan penerangan jalan umum yang ada di desa-desa," terang Fahmi.

Sejauh ini, sudah ada ratusan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang terbangun di Kabupaten Paser dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021 telah terpasang PJUTS di 365 titik, dan di tahun 2022 sudah terpasang 290 titik.

"Total yang terpasang sudah ada 655 titik yang tersebar pada beberapa desa di sepuluh kecamatan se-Kabupaten Paser," ulasnya.

Dengan adanya serah terima hibah PJUTS yang dilakukan, Bupa-

ti Paser berharap agar giat serupa bisa dilakukan di tahun berikutnya. "Supaya bisa menyentuh desa-desa lainnya secara merata, agar pemerataan akan penerangan jalan umum bagi masyarakat bisa terpenuhi," harap Bupati Paser.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Paser Fahmi Fadli didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana bersama Kabag SDA Setda Amri Yulihardi.

*Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari*



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Penandatanganan berita acara Paripurna pengesahan Raperda APBD Perubahan menjadi Perda, Senin (18/9/2023).

## APBD-P PPU 2023 Rp 2,15 Triliun, OPD Diminta Optimalkan Serapan Anggaran

PPU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Penajam Paser Utara (PPU) 2023 telah disahkan, melalui sidang paripurna DPRD, Senin, (18/9/2023). APBD PPU 2023 naik menjadi Rp 2,15 triliun, naik 10 persen dari yang ditetapkan pada APBD 2023 Murni.

Rapat paripurna ini menjadi akhir kehadiran Bupati PPU Hamdam Pongrewa dalam periode kepemimpinan 2018-2023. Yakni Paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Persetujuan bersama DPRD dan Bupati PPU terhadap Perubahan APBD 2023.

Dipimpin oleh Ketua DPRD Syahrudin M Noor, mengatakan dengan telah disetujui dan disahkannya raperda ini menjadi perda, rencana pembangunan daerah tahun dapat segera dirampungkan. Kemudian diharapkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran agar dapat lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran.

"Semoga ini dapat mendorong kemajuan pembangunan daerah di PPU," kata Syahrudin.

Dalam penyampaiannya, ditetapkan dalam APBD Perubahan PPU 2023 sebesar Rp 2.151.101.515.043. Terdapat kenaikan sebesar Rp 204.200.630.985 atau 10 persen dari target pendapatan dalam APBD Murni PPU 2023 sebesar Rp 1.946.900.884.058.

Sementara itu, Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengatakan kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama ini tentu mempengaruhi hal-hal yang ada pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, juga akan mempengaruhi dan memberikan dampak pada kebijakan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal memenuhi target-target sasaran pembangunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Utamanya mencermati dan konsisten dalam menjabarkan dokumen dan arah kebijakannya.

"Di sinilah pentingnya kearifan kita bersama khususnya dua pilar utama

pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menentukan program-program pembangunan ke depan," ujarnya.

Senada, Hamdam juga menegaskan pada seluruh pimpinan OPD agar dalam pengelolaan keuangan lebih berhati-hati dan cermat. Dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan langkah-langkah konkret dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian terhadap program kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

"Kepada segenap jajaran Pemkab PPU untuk senantiasa terus-menerus meningkatkan kinerjanya, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena pengabdian yang kita lakukan ini merupakan tanggung jawab kita, selaku abdi negara dan abdi masyarakat," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi  
Editor : Nicha Ratnasari



# LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU) :**

## JURNALIS

### SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**  
**0815-4910-5488 (PPU)**

**radar.**  
MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP



[www.radaribukota.com](http://www.radaribukota.com) | [www.radarkutim.com](http://www.radarkutim.com)  
[www.radarkukar.com](http://www.radarkukar.com) | [www.samarinda.com](http://www.samarinda.com)

[www.radarberau.com](http://www.radarberau.com) | [www.radar.paser.com](http://www.radar.paser.com) | [www.radarbalikpapan.com](http://www.radarbalikpapan.com)



## **PKA BPSDM DKI JAKARTA PELAJARI INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KE KALTIM**



Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi

## BPSDM KALTIM GELAR ORIENTASI BAGI 2.330 PPPK

**SAMARINDA** - Berdasarkan informasi yang dirilis dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), saat ini tengah menjalankan Orientasi untuk 2330 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung hingga 12 September 2023 ini.

Para peserta yang ikut dalam kegiatan orientasi ini, merupakan para pegawai berstatus PPPK kelas Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim.

"Untuk PPPK kelas Provinsi yang diangkat oleh BKD tahun 2022, kita sudah orientasikan semuanya di tahun 2023 ini. Untuk kelas kabupaten/kota juga sudah sebagian. Sampai Desember nanti tinggal beberapa angkatan Kabupaten/kota saja lagi belum orientasi," ungkap Kepala BPSDM Kaltim,

Nina Dewi, saat dikunjungi MediaKaltim.com di kantornya Selasa (12/9/2023).

Nina Dewi mengatakan, yang sudah ikut PPPK saat ini mayoritas berprofesi sebagai guru.

"Dalam data tersebut mayoritas adalah berprofesi sebagai guru, selebihnya adalah tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya," ujarnya.

Nina Dewi juga menekankan, untuk semua PPPK yang telah menjalani orientasi di BPSDM Kaltim, agar menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif, agar mampu bersaing serta berkualitas.

"Menjadi PPPK yang baik, harus memiliki sikap disiplin, inovatif, kreatif dan bekerja ikhlas," tutupnya. **(adv)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**





PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
**BPSDM KALTIM**  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KALIMANTAN TIMUR



**Dra. Sri Wahyuni M.PP**  
SEKDA PROV. KALTIM

**Dr. H. Ir. Irsan Noor, M.Si**  
GUBERNUR KALTIM

**H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si**  
WAKIL GUBERNUR KALTIM

**Dra. Nina Dewi**  
KEPALA DINAS BPSDM KALTIM



Rangkaian kegiatan kunjungan BPSDM DKI Jakarta

## KUNJUNGI BPSDM KALTIM, PESERTA PKA BPSDM DKI JAKARTA PELAJARI INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menjamu kunjungan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, di Gedung Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (12/8/2023) sore. Kunjungan tersebut dalam rangka studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ASN DKI Jakarta.

Dalam jamuan tersebut, hadir mewakili Gubernur Kaltim Setda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, Kabid PKMF Rina Kusharyanti dan Pimpinan Rumah Sakit Dr Kanujoso Balikpapan. Sedangkan dari pihak BPSDM DKI Jakarta hadir Kepala Bidang Pengembangan Dasar Manajerial dan Fungsional BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Indang Murniningsih beserta rombongan peserta PKA yang berjumlah 33 orang.

Dalam sambutannya, Indang mengatakan tujuan dari datangnya peserta PKA BPSDM DKI Jakarta ke Kaltim adalah untuk belajar inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh Pemprov Kaltim.

"Kami sengaja memilih Kaltim, karena banyak inovasi yang perlu digali di sini, dua locus Badan Pendapatan Daerah Kaltim,

Simpator, yang sempat menjadi top inovator 2022. Kami juga mau melihat inovasi e-Samsat dalam genggaman, inovasi si-dokter yang dikembangkan RS Kanujoso Balikpapan, banyak yang perlu digali agar nanti banyak ilmu yang bisa dibawa pulang ke Jakarta," akunya.

Selain menambah wawasan dari daerah lain, Indang mengatakan tujuan datangnya peserta PKA langsung ke lokasi agar dapat mengidentifikasi lapangan.

"Tujuan kelapangan agar mampu melihat perubahan secara langsung," ujarnya.

"Oleh sebab Ibu Sekda dan Ibu Kepala BPSDM bisa berkenan menerima kami dalam kerjasama dalam kami menggali ilmu di sini," tambahnya.

Sementara itu, Setda Pemprov Kaltim Sri Wahyuni, mengucapkan selamat datang kepada Ibu Indang dan rombongan PKA.

"Selamat datang Ibu Indang dan rombongan, nanti kalau ada waktu kita bisa keliling sungai Mahakam naik kapal di sini untuk menikmati panorama sungai Mahakam dan beserta kuliner ikan sungainya," ucap Sri. (adv)

**Pewarta : Hanaf**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Kepala BPSDM Dra Nina Dewi, Ketua Panitia Penyelenggara dan para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP angkatan 14.

## FAHRURROZI, RAIH PERINGKAT PERTAMA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN 14

**SAMARINDA** - Fahrurrozi S.Sos dari Kelurahan Pelita, Samarinda Ilir menduduki peringkat pertama dalam hasil Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) pada angkatan ke-14 yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim).

Dari 40 peserta, Fahrur berhasil memperoleh nilai tertinggi di dalam pelatihan yang telah dimulai sejak 22 Mei - 12 September 2023 lalu.

"Setelah dari evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan, penilaian sikap dan perilaku, akhirnya kita tetapkan peringkat satu," ungkap Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti, S.STP, M.M. yang juga selaku panitia penyelenggara.

Kepala BPSDM Kaltim, Dra. Nina Dewi M.AP berharap kepada para peserta PKP agar mampu membuat proyek perubahan, serta bisa menjadi referensi dan dapat diimplementasikan untuk membantu kelancaran tugas dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Data dari panitia penyelenggara, tercatat peringkat tiga besar peserta pelatihan. Peringkat 1 : Fahrurrozi S.Sos dari Kelurahan Pelita, Peringkat 2 : Muhammad Syafe'i S.T dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, dan Peringkat 3 : Siti Zubaida SE dari Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. (adv)

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**

PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**BPSDM KALTIM**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

Dra. Sri Wahyuni M.PP  
SEKDA PROV. KALTIMDr. H. Ir. Isran Noor, M.Si  
GUBERNUR KALTIMH. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si  
WAKIL GUBERNUR KALTIMDra. Nina Dewi  
KEPALA DINAS BPSDM KALTIM

Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi dalam rangkaian Sharing Session BPSDM dari aplikasi ZOOM.

## **BPSDM AKAN GELAR SHARING SESSION ONLINE UNTUK UMUM, HADIRKAN PENELITI DARI BRIN**

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) akan menggelar Sharing Session secara daring untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada hari Selasa (19/9/2023) besok.

Kali ini, sharing session tersebut menggunakan aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube BPSDM Kaltim pada pukul 10.00 - 12.00 Wita.

Setiap peserta yang mengikuti kegiatan lewat aplikasi Zoom akan diberi-

kan sertifikat pelatihan.

Pada Sharing Session ke-42 yang bertema "Menimbang Peluang dan Tantangan Bagi ASN" akan menampilkan narasumber dari peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rusli Cahyadi, Phd

Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi M.AP, berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat menyerap materi yang disampaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa menambah pengetahuan baru.(adv)

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



# ASYIK PESTA SABU, TIGA SEKAWAN DICIDUK

BACA HALAMAN 2-3



BAWASLU MINTA KESADARAN  
PARPOL TURUNKAN  
SPANDUK KAMPANYE

BACA HALAMAN 8



IS, NA dan AB, saat ditangkap Satreskoba Polres Tarakan.

# Asyik Pesta Sabu, Tiga Sekawan Ditangkap Polisi

TARAKAN - IS, NA dan AB, tiga sekawan ini ditangkap Satreskoba Polres Tarakan saat asyik pesta sabu di salah satu rumah di belakang Posko Kampung Bersinar Jalan Cendawan RT 03 Kelurahan Selumit Pantai, Selasa (12/9/2023) sekira pukul 07.00 Wita.

Untuk diketahui, Kampung Bebas dari Narkoba (Bersinar) baru saja diresmikan oleh Polres Tarakan pada

Rabu (6/9/2023). Kampung bersinar diproyeksikan sebagai tempat rehabilitasi, melayani pemberantasan dan pencegahan narkotika.

Kasat Resnarkoba Polres Tarakan, IPTU Gian Evla Tama melalui KBO IPDA Amiruddin mengatakan penangkapan tiga pelaku ini bermula dari adanya laporan masyarakat pada Selasa (12/9/2023) sekira pukul 06.30 Wita, bahwa terdapat sebuah

rumah di Beringin III Jl. Cendawan RT 03 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau tepat di belakang Posko Bersinar sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi sabu-sabu.

Usai menerima laporan tersebut, personel melakukan penyelidikan di belakang posko dan setelah diamati ada rumah kontrakan dan lampu masih menyala.

“Pagi tapi lampu masih menyala maka dicurigai dan dilakukan pengeledahan di rumah dan ada tiga orang di dalam dan saat digeledah, ditemukan alt bong, alat hisap dan korek api dan plastic bekas pembungkus sabu sudah terpakai,” ungkapnya.

Dari hasil interogasi kepada ketiga pelaku tersebut, mereka mengakui bahwa telah mengkonsumsi sabu. Polisi langsung mengamankan ketiga orang laki-laki tersebut ke Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Amiruddin menyebut dari hasil tes urine ketiga pelaku positif menggunakan narkoba. Diketahui pula bahwa sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tak dikenal.

“Ketiganya mengonsumsi satu bungkus dengan harga Rp 100 ribu. Belinya di Timbunan RT 12 dan tidak kenal sama yang beli. Sistemnya dia beli dan langsung kasih uang kemudian datang orang tidak kenal kasih satu bungkus dan langsung jalan, transaksinya cepat,” ungkapnya.

Adapun terhadap ketiga pemakai ini akan dilakukan rehabilitasi jika

tidak terlibat dalam jaringan peredaran dan sesuai prosedur. Sementara itu, Pasal yang dipersangkakan kepada ketiga pemakai ini yakni Pasal 112 Ayat 1 dan subside pasal 127 ayat 1 huruf a penyalahgunaan narkoba.

“Penyalahgunaan dilakukan TAT terpadu dan menunggu hasil assessment. Kalau tidak masuk jaringan peredaran akan direhabilitasi dan kerja sama BNNK Tarakan,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Praselia

Editor: Andhika



# Gencar Lakukan Pemeriksaan, Dinkes Tarakan Catat 59 Kasus HIV

**TARAKAN-** Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat sepanjang Januari hingga September 2023, telah memeriksa 7.154 orang, 59 diantaranya dinyatakan positif HIV. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Tarakan, Irwan Yuwanda kepada Kaltimtaras, Senin (18/9/2023).

Dia mengatakan, Dinkes Kota Tarakan rutin melakukan pemeriksaan kasus HIV sebagai langkah untuk memutus mata rantai penyebarannya. "Ketika seseorang sudah diperiksa dan hasilnya positif, Dinkes dapat bertindak cepat dan memberi obat yang sesuai. Sehingga penderita dapat hidup dengan layak meskipun telah dinyatakan positif HIV," ucapnya.

Untuk pemeriksaan ini, kata Irwan, dilakukan pada kelompok resiko. Adapun kelompok tersebut seperti wanita pekerja seks (WPS), waria, Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), warga binaan permasyarakatan, pengguna napza suntik, ibu hamil, pasien Tuberkulosis (TBC) dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Selain pemeriksaan pada kelompok resiko dan khusus, pemeriksaan juga dilakukan pada seluruh masyarakat yang berisiko terinfeksi HIV. "Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat memeriksa status HIV-nya secara mandiri dengan mendatangi langsung pelayanan pemeriksaan HIV," lanjutnya.

Menurutnya, HIV merupakan penyakit menular yang seringkali mendapat stigma negatif oleh masyarakat. Seringkali seseorang takut untuk memeriksa dan masyarakat pun takut untuk berinteraksi. Padahal, HIV menular melalui hubungan seksual, berbagi jarum suntik, produk darah dan organ tubuh, serta ibu hamil positif HIV ke bayinya.

"Jadi tidak apa apa bersentuhan tangan ataupun ngobrol," katanya.

Dinas Kesehatan didukung oleh LSM untuk mendukung pencegahan dan pengendalian HIV yaitu Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan Penjangkau Lapangan (PL) yang bertugas sesuai dengan fungsi dan tugas masing2 dari LSM yang menaungi. "Kita juga punya penjangkau lapan-

gan khusus, waria nanti ada penjangkau lapangan khusus, PSK juga ada. Merekalah nanti yang akan melakukan pendampingan dan pemeriksaan," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, untuk pengecekan HIV dan pengobatan diberikan secara gratis. Di Kota Tarakan, lanjut Irwan, seluruh puskesmas telah menyediakan layanan pengobatan HIV. Untuk obat didatangkan langsung dari pusat melalui Kemenkes.

Kendati demikian, Irwan tak menampik menemui tantangan dalam penanganan HIV, yakni tidak semua orang mau memeriksa status HIV-nya. Bahkan, tidak semua orang mau mengikuti pengobatan HIV secara rutin. Padahal menurutnya, dengan melakukan pengecekan secara luas dapat meminimalisir penyebaran HIV.

"Selama ini banyak orang yang ti-

dak mau cek status HIV-nya karena takut. Bahkan, ketika mengetahui statusnya positif HIV, langsung menghilang dan tidak mau melakukan pengobatan secara rutin. Untuk itu, Dinkes melalui tim KDS terus memotivasi dan memberi edukasi tentang pentingnya pengobatan HIV secara rutin. Agar dapat hidup sehat meskipun terkena HIV," paparnya.

Selain itu, kesulitan juga dialami dalam pemantauan Wanita Pekerja Seks (WPS) yang belum pernah melakukan pemeriksaan dengan tim layanan ataupun yang bekerja melakukan transaksi melalui media sosial. "Inikan pasti ada aja di Tarakan, tapi kita gak tau posisinya dimana dan melakukan transaksi dimana." tutupnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasatia

Editor: Andhika



Kantor Dinas Kesehatan Kota Tarakan.



ADE/MKR

Penyelenggara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Tarakan, Otto Simon Tanduk.

## Ini Dua Masalah yang Sering Terjadi dalam Penyelenggaraan Bimas Kristen di Tarakan

TARAKAN - Penyelenggara Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tarakan, Otto Simon Tanduk mengungkapkan ada dua permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen. Dua masalah tersebut, yakni perselisihan antar sinode dan penyebaran agama yang dilakukan oleh Saksi Yehuwa dengan mendatangi warga berbeda iman.

Otto mengatakan, perselisihan antar sinode berkaitan dengan saling berebut Jemaat. Namun permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melakukan pendekatan kepada sinode. Untuk diketahui, sinode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kesatuan wilayah gereja.

"2 Oktober nanti, saya sudah enam tahun di sini (Kemenag Tarakan), permasalahan yang muncul itu perselisihan antar sinode. Ini kan ada aja saingan antar sinode dalam hal pelayanan secara positif pasti

ada ketersinggungan. Misalkan saya memegang satu Jemaat, pastinya Jemaat ini tidak terlepas dari sinode. Tentunya saya berusaha memelihara Jemaat untuk tidak pindah dan saya pun berusaha menambah. Kadang karena interaksi itu ada terjadi ketersinggungan. Itulah bumbu-bumbu organisasi," ucapnya saat ditemui di ruang kerja Bimas Kristen Kemenag Tarakan, Senin (18/9/2023).

Selain itu, masalah lainnya berkaitan dengan banyaknya laporan dari masyarakat bahwa Saksi Yehuwa mendatangi rumah warga yang berbeda iman untuk masuk ke dalam ajarannya. Laporan ini, kata Otto, datang dari warga Juata Laut, Kampung 1, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

"Sebenarnya Saksi Yehuwa ini tidak juga serius karena mereka juga terdaftar resmi. Tapi mereka dalam menjalankan kegiatannya yang mendatangi orang tidak seiman. Ini menjadi masalah, jadi yang tidak seiman mendatangi diajak. Sehingga muncul

laporan-laporan dari warga Kampung 1 Juata Laut dan ada juga laporan ke kepolisian dan FKUB," ungkapnya.

Dia menyebut permasalahan ini sudah diselesaikan melalui pertemuan pihak terkait seperti kepolisian, FKUB, dan Kemenag bersama pimpinan Saksi Yehuwa. "Yang kami lakukan di kemenag adalah memanggil pihak saksi hewuwa dan tindak lanjutnya mengadakan pertemuan dengan FKUB. Adapun hasil kesepakatan bersama itu yang punya wewenang adalah FKUB," ucapnya.

Sebagai informasi berdasarkan Data Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Tarakan tahun 2023, total umat Kristen di Tarakan sebanyak 23.433 orang. Sementara itu gereja sebanyak 95 dan ada 93 pendeta di Kota Tarakan. Selanjutnya, Lembaga atau ormas Kristen sebanyak 10. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya  
Editor: Andhika





Jalan Bulu Perindu tahun ini dilanjutkan pengerjaan dengan luas jalan 900 meter.

## Kendaraan Over Kapasitas Melintasi Jalan Bulu Perindu, Dewan Harusnya Dikasih Teguran

TANJUNGSSELOR—Pengerjaan jalan Bulu Perindu yang menghubungkan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas serta beberapa wilayah sekitarnya tahun ini dilanjutkan.

Saat ini, progres pengerjaan di lokasi masih pada pembuatan pembatas jalan dan siring jalan pada kedua sisi badan jalan. Sebelumnya, pemkab Bulungan telah melakukan pengaspalan pada jalan tersebut. Namun masih ada 900 meter yang belum dilakukan pengaspalan sehingga baru direalisasikan pada tahun 2023.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (DPUPR) Bulungan, Khairul saat dikonfirmasi menuturkan pengerjaan jalan Bulu Perindu jika dipresentasikan sudah mencapai kurang lebih 50 persen. Pihaknya memastikan, penyelesaian aspal jalan tersebut dimungkinkan selesai sebelum akhir tahun.

“Kita targetkan, akhir tahun sudah selesai,” ujar Khairul, kepada wartawan, Senin (18/9/2023).

Diperkirakan, kalau setelah pengamparan dan agregat, kemungkinan pada bulan November sudah selesai.

“Kita targetkan setiap pengerjaan yang telah diatas 50 persen saat ini, sebelum akhir Desember dapat selesai semuanya,” tambah dia.

Diwartakan sebelumnya, usai Jalan Bulu Perindu dilakukan pengaspalan, kendaraan truk dengan muatan penuh dilarang melintas. Karena standardisasi kekuatan jalan tersebut hanya bisa untuk dilalui kendaraan dengan muatan kapasitas maksimal 8 ton.

Namun, praktek di lapangan, masih ditemukan kendaraan over kapasitas melintas jalan Bulu Perindu, seperti truk dengan muatan penuh. Mengenai itu, DPUPR Bulungan meminta adanya kesadaran masyarakat.

“Kalau bisa, harus adanya kesadaran pengendaranya. Jika kendaraan dari Gunung Seriang ke Tanjung Selor, itu sudah jelas truk dengan muatan tidak diperbolehkan melintas, kita berharap kesadaran pengendara lah untuk sama-sama menjaga, biar jalan itu awet dan bertahan lama,” jelasnya.

Mengenai adanya rencana pemasangan portal, dimungkinkan tidak direalisasikan tahun ini. Padahal, portal bisa menjadi solusi untuk menghenti-

kan kendaraan dengan kapasitas berat melintas di Jalan Bulu Perindu.

“Kalau untuk rencana pembangunan portal, itu tidak dijadikan. Perimbangannya, ada mobil dengan boks tinggi tapi tanpa muatan, jadi masih perlu dikaji mengenai rencana itu,” terangnya.

Sementara itu, ketua DPRD Bulungan Kilat saat dikonfirmasi menuturkan, harusnya pengendara lalulintas yang melewati jalan Bulu Perindu patuhi larangan dari pemerintah. Soal kendaraan yang diperbolehkan melintas, serta ada sanksi yang diberikan ketika masih ditemukan pengendara yang lalai dan abai terhadap larangan tersebut.

“Sanksi yang diberikan bisa teguran atau tertulis, karena biar ada efek jera bagi pengendara yang abai terhadap larangan. Kita ingin, Jalan tersebut bisa awet digunakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



Material pembangunan orpit Jembatan Salimbat, sebagian sudah tiba di lokasi.

## Penutupan Jembatan Salimbatu Dimajukan Sepekan Kedepan

TANJUNG SELOR – Penutupan Jembatan Salimbatu dari Tanjung Palas-Tanjung Palas Tengah yang dijadwalkan pada Senin 18 September 2023, hari ini ditunda.

Penundaan itu, lantaran akan dibangun jembatan kayu yang nantinya digunakan untuk pejalan kaki. Kepada wartawan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bulungan, Aposto Lewira membenarkan, adanya rencana penundaan penutupan Jembatan Salimbatu.

“Iya, untuk hari ini memang dijadwalkan akan dilakukan penutupan total, tapi itu ditunda karena akan dibangun Jembatan sementara untuk digunakan bagi pejalan kaki,” ucap Aposto kepada wartawan, Senin (18/9/2023).

Dia melanjutkan, pengerjaan Jembatan sementara ditargetkan ram-

pung sepekan kedepan. Selain digunakan untuk pejalan kaki, dimungkinkan bisa dilewati oleh kendaraan roda dua.

Dibangunnya Jembatan sementara ini, kata dia dari beberapa masukan masyarakat. Serta untuk memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat sehingga tidak berhenti secara total. Solusi sebelumnya mengenai tambangan untuk penyebrangan, kata dia masih diberlakukan.

“Untuk perahu tambangan yang sudah disiapkan oleh kontraktor tetap akan digunakan,” tukasnya.

Sedangkan, untuk kendaraan roda empat aksesnya dialihkan melalui Desa Kelubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara atau jalan poros trans Kalimantan. Sehingga, aktivitas pengerjaan orpitw Jembatan dipastikan tidak akan terganggu.

“Saat ini, distribusi material untuk

pengerjaan sudah ada di lokasi. Kita berharap pengerjaan itu dapat selesai tepat waktu,” tuturnya.

Secara teknis, ada beberapa pekerjaan yang akan dilakukan. Seperti, pemasangan tiang pancang dan pembangunan drainase. Kemudian, lantai jembatan dicor ulang, karena sudah ada yang terkelupas. Termasuk, akan dipasang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Sebelumnya, kepala DPUPR Bulungan, Khairul saat dikonfirmasi menuturkan untuk anggaran pengerjaan orpit Jembatan Salimbatu dianggarkan sebesar Rp 9,5 miliar.

“Sumber anggaran itu dari APBD murni tahun 2023, senilai Rp 9,5 miliar,” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur  
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

Spanduk, baliho dan stiker bacaleg bertebaran di wilayah Bulungan. Bawaslu minta untuk diterbitkan secara sukarela.

## Bawaslu Minta Kesadaran Parpol Turunkan Spanduk Bernuansa Kampanye

TANJUNG SELOR - Bawaslu Bulungan gandeng stakeholder terkait termasuk partai politik, satukan persepsi soal maraknya pemasangan spanduk, stiker dan baliho di wilayah Bulungan.

Beberapa alat sosialisasi tersebut bernuansa kampanye. Karena mengandung kata ajakan, dengan mencantumkan nomor urut, foto dan slogan bakal calon legislatif (bacaleg). Padahal, masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

"Artinya, saat ini belum memasuki tahapan kampanye. Tetapi, fenomena ini marak bermunculan dan hampir ada di setiap daerah," kata Ketua Bawaslu Bulungan, Dwi Suprpto saat dikonfirmasi, Senin (18/9/2023).

Materi sosialisasi yang dimaksud, kata dia dalam tanda kutip bernuansa kampanye. Memang, materi sosialisasi yang diatur dalam PKPU 15 tahun 2023 itu yang berkaitan dengan ranah internal partai politik. "Artinya tidak memasang baliho dan alat sosialisasi lainnya yang menimbulkan

kan citra diri, ajakan dan nomor urut partai," tukasnya.

Dengan adanya sosialisasi, berupa penyatuan persepsi kata Dwi diharapkan apa yang dilakukan oleh teman-teman parpol tidak melenceng dari aturan dan regulasi yang ada.

"Kita ingin satukan persepsi, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman partai politik saat ini apakah materi kampanye atau hanya sebatas sosialisasi. Yang jelas, Bawaslu melihat materi yang disosialisasikan masuk area ajakan kampanye," tuturnya.

Hanya saja, Bawaslu belum bisa melakukan penindakan karena belum memasuki tahapan kampanye dan penetapan calon oleh KPU, jadi dengan dilibatkan seluruh stakeholder terkait diharapkan dapat menindaki sesuai dengan kapasitas dan kewenangan setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

"Misalkan ada di bagian pertamanan, tata kota, tata ruang termasuk dengan Dinas Perhubungan. Di ranah tersebut, kemungkinan besar ada potensi pelanggaran yang dilakukan

oleh teman-teman partai politik. Kita libatkan OPD terkait untuk memberikan edukasi, bahwa ada ketentuan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan sosialisasi," terangnya.

Bawaslu berharap, dari sosialisasi itu dapat menumbuhkan kesadaran, kemauan dan partai politik untuk menurunkan materi sosialisasi yang bernuansa kampanye seperti spanduk, stiker, baliho dan sejenisnya.

"Kita minta partai politik memiliki kesadaran untuk menurunkan spanduk dan baliho tersebut, sebelum nanti kita tindak bersama dengan Satpol PP," tegasnya.

Dengan terlebih dahulu dikeluarkan surat imbauan kepada setiap partai politik yang ada. "Kita minta diperbaiki atau ditertipkan oleh masing-masing partai politik, demi menjaga keamanan dan kondusifitas dan keamanan bersama," pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur  
Editor: Andhika